



ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

Disampaikan pada acara:
Musrenbang RKPD Tahun 2026 Kota Salatiga

Kota Salatiga, 25 Maret 2025

OUTLINE

- 1** PROLOG
- 2** ARAH KEBIJAKAN NASIONAL
- 3** ARAH KEBIJAKAN
PROVINSI JAWA TENGAH
- 4** ARAHAN UNTUK KOTA SALATIGA



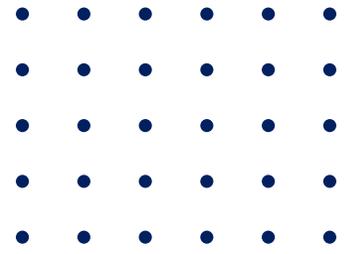
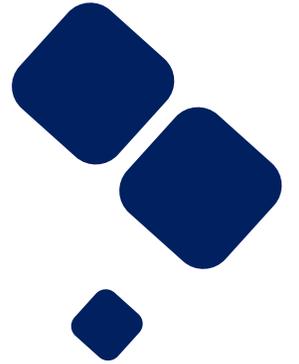
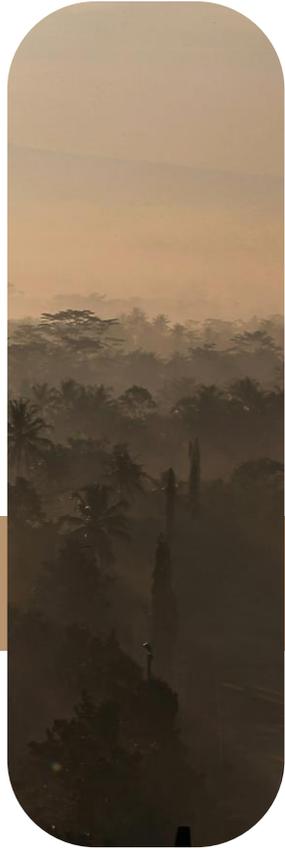
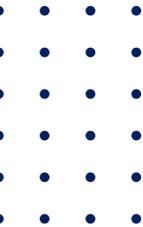


Photo by <https://unsplash.com/>

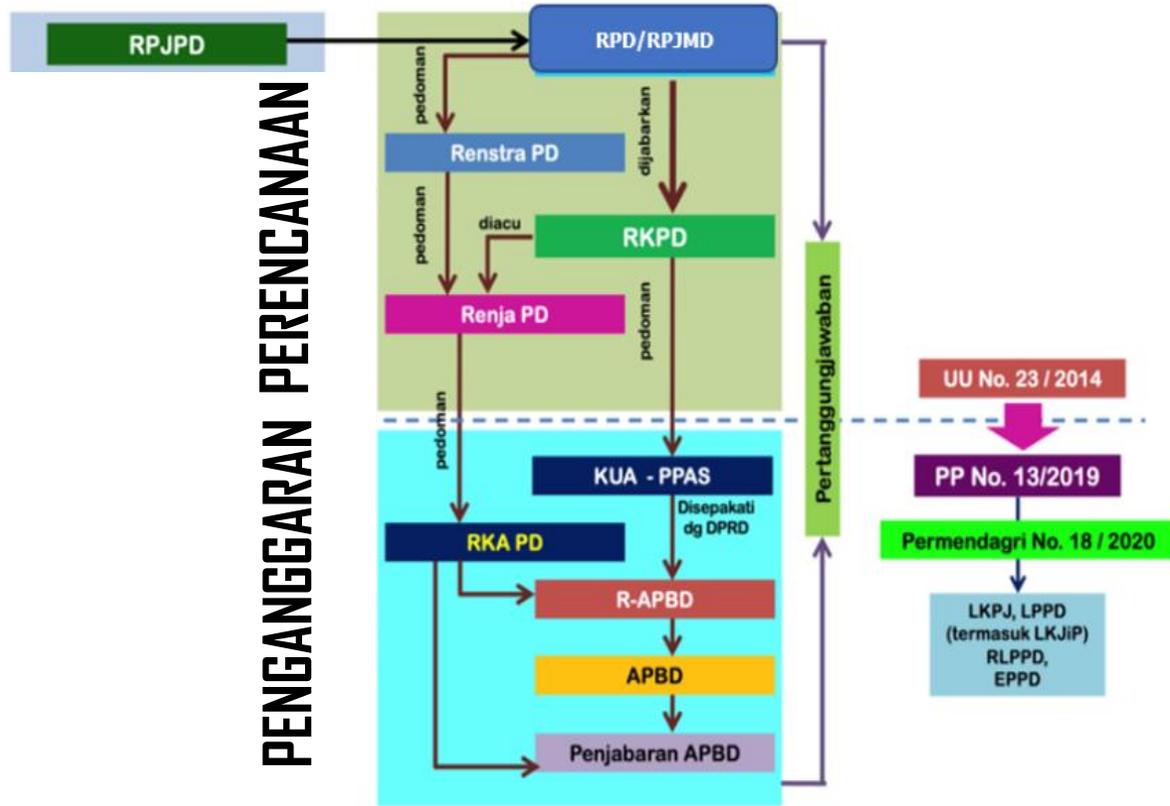


PROLOG



KETERKAITAN DOKUMEN DAN JADWAL PENYUSUNAN DOKREN KABUPATEN KOTA

KETERKAITAN DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN LAINNYA



- ❑ **Substansi RKP 2026 berpedoman pada RPJMD 2025-2029**
- ❑ **RKP 2026 merupakan tahun pertama dari perencanaan arah kebijakan jangka menengah daerah**

JADWAL PENYUSUNAN RPJMD DAN RKP KAB/KOTA

RPJMD	RKP
❖ KONSULTASI PUBLIK: Maret 2025	❖ KONSULTASI PUBLIK: Februari 2025
❖ Nota Kesepakatan: 10 Hari setelah diterima	
❖ Konsultasi Ranwal ke Provinsi: April Mgg III/IV 2025	
❖ Musrenbang: PL. 75 Hari	❖ Musrenbang: Maret 2025
❖ Pembahasan dan Persetujuan Raperda dg DPRD: PL. 40 Hari setelah diterima	❖ Fasilitasi RKP ke Provinsi: Juni Mgg III/IV 2025
❖ Evaluasi Raperda ke Provinsi: Mgg II/III Juli 2025	
❖ Penetapan: 6 bulan setelah KDH/WKDH dilantik	❖ Penetapan: 1 Minggu Setelah Provinsi ditetapkan/ Juli Mgg I

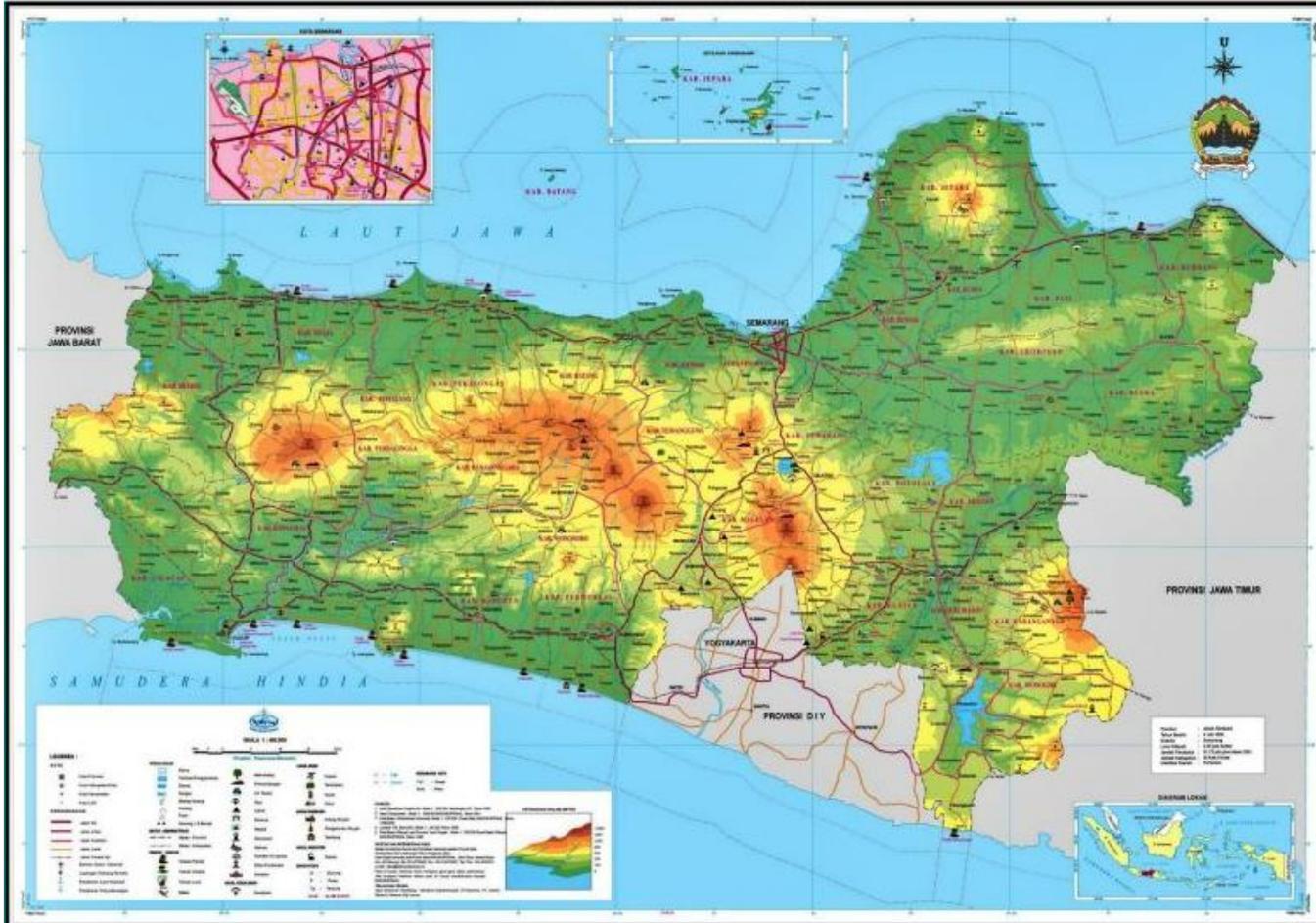
DASAR HUKUM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

- 1 UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 2 UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023
- 3 UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- 4 UU No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
- 5 Perpres No. 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
- 6 Perda Jateng No. 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu
- 7 Perda Jateng No. 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045
- 8 Perda Jateng No. 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044
- 9 Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Dalev Pemb Daerah, Tata Cara Ev Ranperda Ttg RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perub RPJPD, RPJMD, dan RKPD
- 10 Pergub Jateng No. 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2024-2026





PROFIL PROVINSI JAWA TENGAH



Luas wilayah : 3,25 juta hektar



Memiliki 35 Kabupaten/Kota, terdiri dari: 29 Kabupaten dan 6 Kota



Jumlah Penduduk: 37,54 juta jiwa

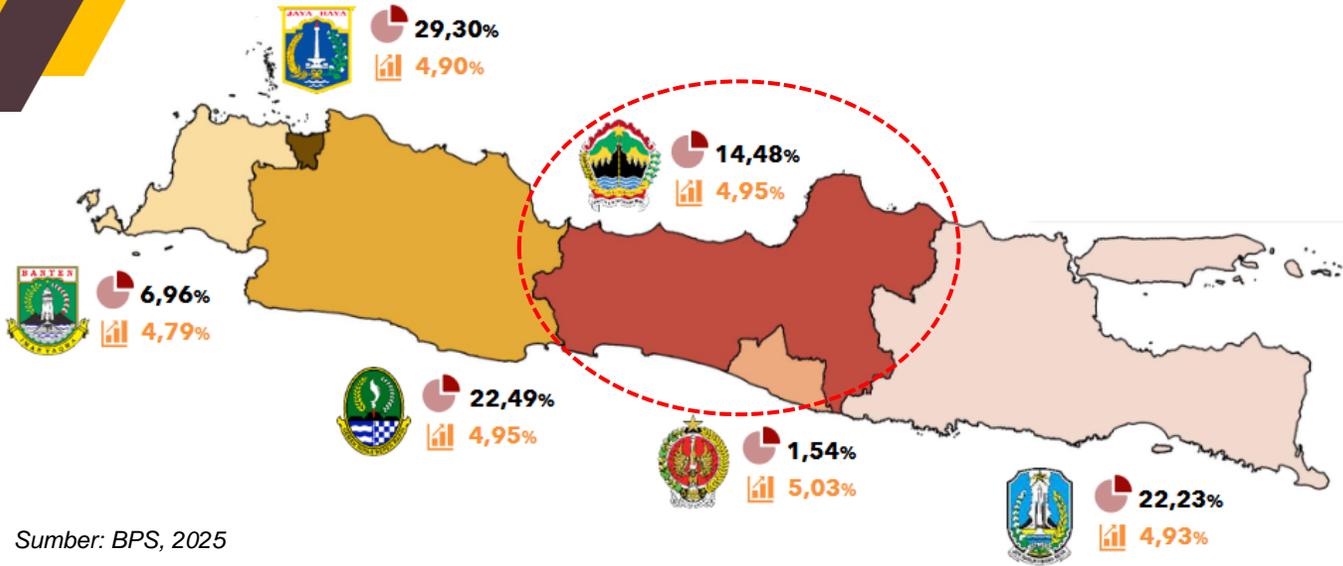


Bonus Demografi :
Penduduk Usia Produktif **55,88%**



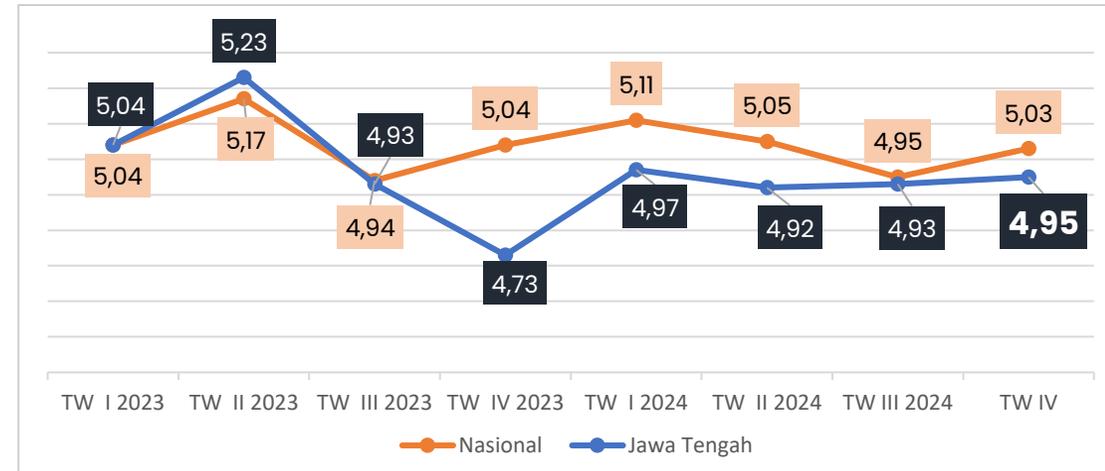
Memiliki potensi sumber daya alam besar dikuatkan dengan keberagaman budaya yang unggul

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah



Sumber: BPS, 2025

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Tahun 2023-2024 (c-to-c) **tertinggi di antara Provinsi Besar Pulau Jawa** yaitu sebesar **4,95 persen**



Jawa Tengah berkontribusi sebesar **14,48 persen** terhadap **perekonomian di Pulau Jawa** atau **8,25 persen** terhadap **seluruh provinsi di Indonesia**

STRATEGI PENINGKATAN EKONOMI JAWA TENGAH

Kemudahan Berusaha & Peningkatan Iklim Investasi

Penguatan Daya Beli Masyarakat & Pengendalian Inflasi

Penguatan Daya Saing dan Nilai Tambah Industri

Pemberdayaan UMKM

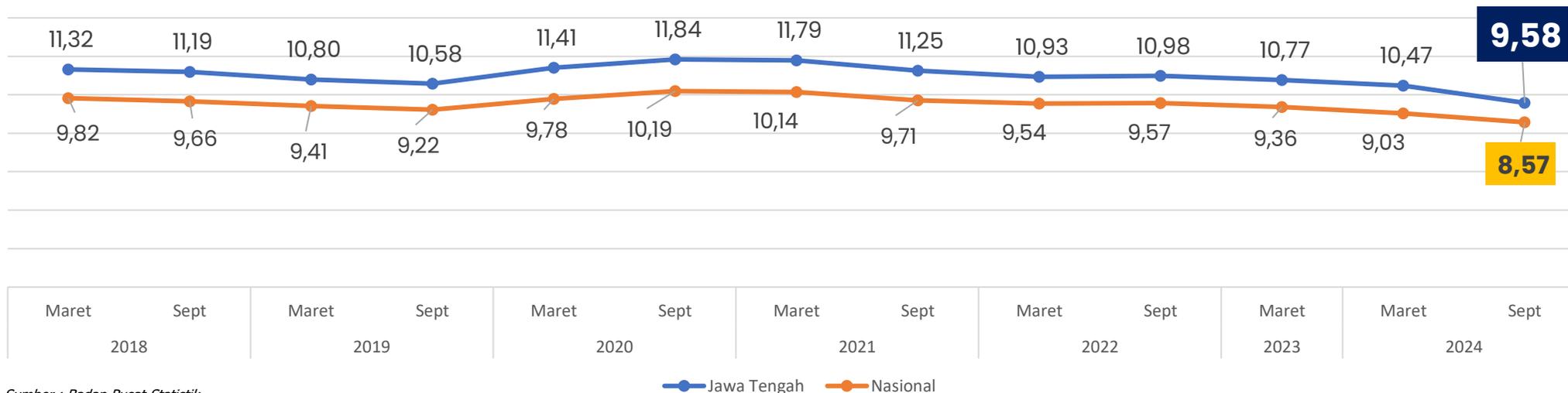
Peningkatan Produktivitas SDM

Pengembangan ekonomi sirkular dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan

Pemerataan Pembangunan & Konektivitas

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN JAWA TENGAH

Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 – 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI JAWA TENGAH



Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin

- pemberian Kartu Jateng Sejahtera (KJS);
- BSM SMA/SMK/SLB & pemberian seragam siswa miskin;
- Bantuan listrik murah;
- Rehabilitas Sosial & Jaminan Sosial



Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan UMKM

- Peningkatan akses pekerjaan melalui program padat karya;
- Peningkatan kapasitas SDM;
- Peningkatan akses terhadap pembiayaan & pasar;
- Peningkatan akses pembiayaan UMKM seperti KUR



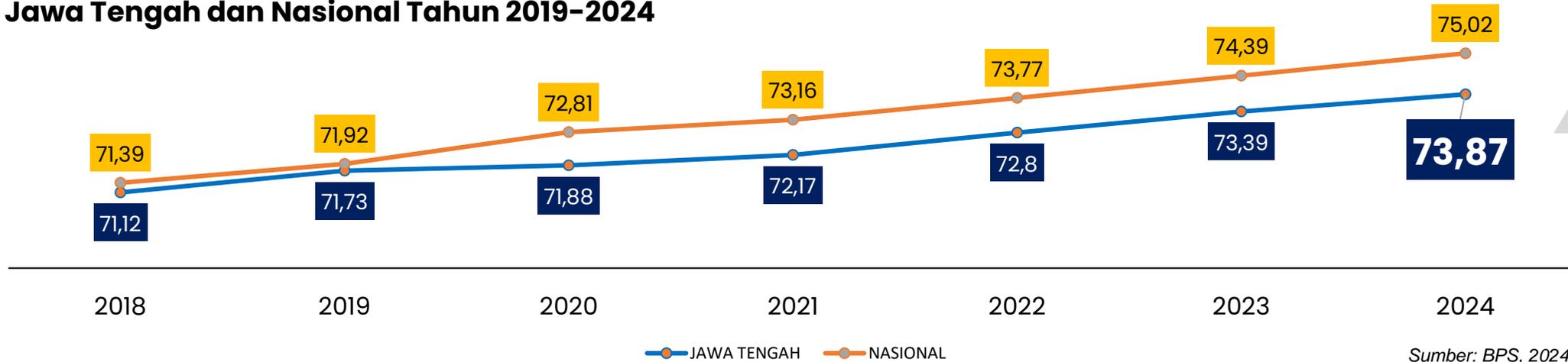
Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan

- Pemenuhan pelayanan dasar;
- Peningkatan konektivitas antarwilayah;
- Gerakan 1 OPD 1 Desa Dampingan, Penggunaan dana desa untuk penanggulangan kemiskinan



PEMBANGUNAN SDM JAWA TENGAH

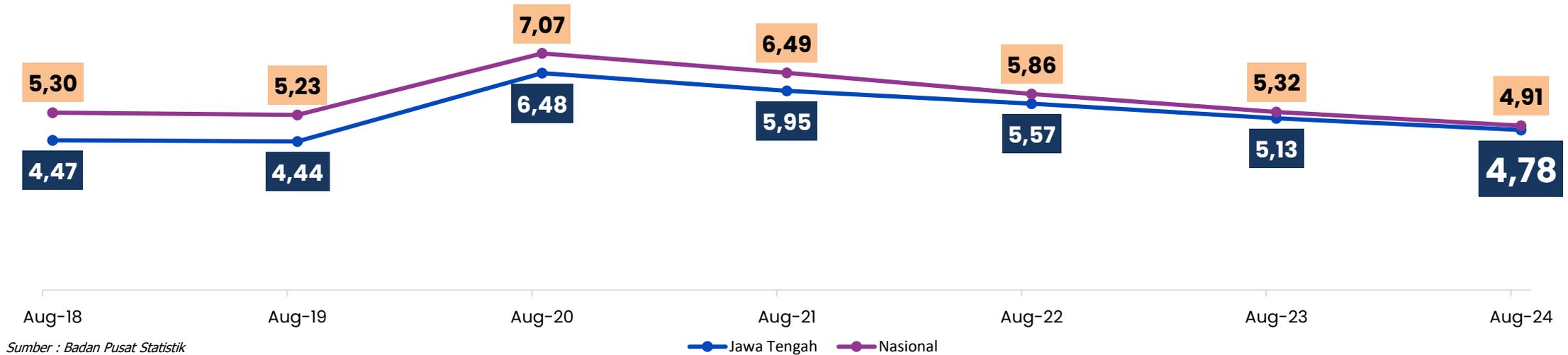
Capaian Indeks Pembangunan Manusia Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019–2024



1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yang direpresentasikan dalam 3 dimensi yaitu pendidikan, kesehatan dan kehidupan layak.
2. Kebijakan pembangunan Pendidikan diarahkan pada **peningkatan pendidikan berkualitas yang inklusif melalui pemerataan akses layanan** serta **mutu pendidikan yang berorientasi pada nilai, dan berbasis teknologi**, termasuk **pendidikan karakter**.
3. Kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan pada **kesehatan untuk semua** melalui **pelayanan kesehatan yang paripurna dan inklusif** yang dilaksanakan untuk menjamin tersedianya akses dan layanan kesehatan berkualitas secara merata dan berkeadilan.

KEBIJAKAN PENURUNAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 – 2024



STRATEGI PENURUNAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA



Menciptakan dan memperluas kesempatan kerja



Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja



Meningkatkan kepatuhan penerapan peraturan tenaga kerja serta pencegahan dan penyelesaian masalah Tenaga Kerja



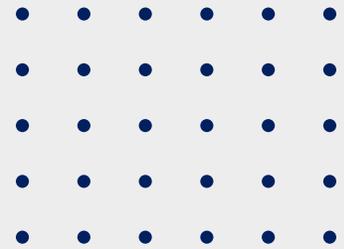
Penguatan Lembaga pelatihan kerja (LPK terakreditasi)



Mendorong Kab/Kota untuk Menyusun Perencanaan Tenaga Kerja



Meningkatkan perlindungan tenaga kerja, jamsos, kesra pekerja



ARAH KEBIJAKAN NASIONAL



ARAH KEBIJAKAN NASIONAL

Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN

8 MISI DALAM RANWAL RPJMN 2025-2029



Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);



Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;



Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;



Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;



Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;



Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.



Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;



Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

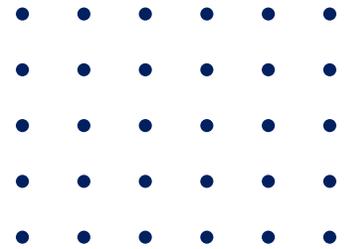


17 Program Prioritas Presiden

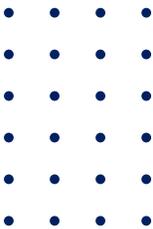
- 1 Mencapai swasembada pangan, energi, dan air
- 2 Penyempurnaan sistem penerimaan negara
- 3 Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
- 4 Pencegahan dan pemberantasan korupsi
- 5 Pemberantasan kemiskinan
- 6 Pencegahan dan pemberantasan narkoba
- 7 Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
- 8 Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi
- 9 Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
- 10 Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
- 11 Menjamin pelestarian lingkungan hidup
- 12 Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani
- 13 Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan
- 14 Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya
- 15 Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
- 16 Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah
- 17 Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

8 Program Hasil Terbaik Cepat

- 01 Memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
- 02 Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten.
- 03 Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
- 04 Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
- 05 Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
- 06 Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.
- 07 Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
- 08 Mendirikan Badan Penerimaan negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.



ARAH KEBIJAKAN PROVINSI JAWA TENGAH





ARAH KEBIJAKAN RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025 - 2045

Visi

**“Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional
yang Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan”**

8 Misi Pembangunan

1. Transformasi Sosial,
2. Transformasi Ekonomi,
3. Transformasi Tata Kelola,
4. Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah,
5. Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi
6. Pembangunan Kewilayahan Yang Merata Dan Berkeadilan
7. Sarana Dan Prasarana Yang Berkualitas Dan Ramah Lingkungan
8. Kestinambungan Pembangunan

6 Sasaran Pembangunan

1. Terwujudnya SDM unggul dan berdaya saing yang inklusif
2. Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan
3. Terwujudnya Tata Kelola yang berintegritas dan dinamis
4. Terwujudnya kondusivitas wilayah didukung stabilitas ekonomi makro daerah
5. Terwujudnya Masyarakat yang Berkarakter dan Berketahanan Sosial
6. Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Bencana

17 Strategi Pencapaian

CJ01. Kesehatan untuk Semua; CJ02. Pendidikan Berkualitas secara Inklusif; CJ03. Perlindungan Sosial yang Adaptif

CJ04. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi; CJ05. Penerapan Ekonomi Hijau; CJ06. Transformasi Digital; CJ07. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global; CJ08. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertmbhn Ekonomi

CJ09. Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas, adaptif dan kolaboratif

CJ10. Ketenteraman dan ketertiban, serta demokrasi substansial; CJ11. Stabilitas ekonomi makro daerah; CJ12. Daya saing daerah dan ketahanan wilayah

CJ13. Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter; CJ14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

CJ15. Lingkungan Hidup Berkualitas; CJ16. Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan; CJ17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim



ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2025– 2029

Dalam Ranwal RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025 – 2029



**NGOPENI.
NGLAKONI.**
Jateng

VISI

“Terwujudnya Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi yang Maju, Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045”

MISI

MISI 1

Meningkatkan **Layanan Dasar** yang Inklusif untuk mewujudkan **Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global**.

MISI 2

Meningkatkan **Pertumbuhan Perekonomian** Perkotaan dan Pedesaan Berbasis **Sektor Unggulan** yang **Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan**.

MISI 3

Mewujudkan **Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif** dengan mengedepankan nilai-nilai **Integritas**.

MISI 4

Mewujudkan **Pembangunan Infrastruktur** Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui **perencanaan tata ruang yang responsif**.

MISI 5

Menjaga **Stabilitas dan Kondusivitas Daerah** dengan **pendekatan budaya lokal**, serta menjamin **kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial** serta hak asasi manusia yang berkeadilan.

MISI 6

Menjaga **iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif** untuk membuka kesempatan kerja dan **berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah**. Serta **Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi**.



3 FOKUS KERJA

JATENG SIGAP

Jateng SIGAP!

Merupakan upaya Pemerintah dalam menghadirkan **Pemerintahan** yang **Responsif** dalam menjawab kebutuhan Masyarakat Jawa Tengah. Melalui **Transformasi Tata Kelola Pemerintahan** yang dapat diwujudkan dengan Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat

JATENG MAKMUR

Jateng MAKMUR!

Merupakan langkah Pemerintah dalam menghadirkan kesejahteraan Masyarakat Jawa Tengah melalui **Transformasi Ekonomi** yang tidak hanya berfokus pada **Perekonomian Perkotaan** juga **Pedesaan, Perencanaan Tata Ruang** yang **responsif**, dengan mengoptimalkan **Pemerintahan Partisipatif, Kolaboratif dan Integratif** serta dukungan **Iklm Investasi**.

JATENG NYAMAN

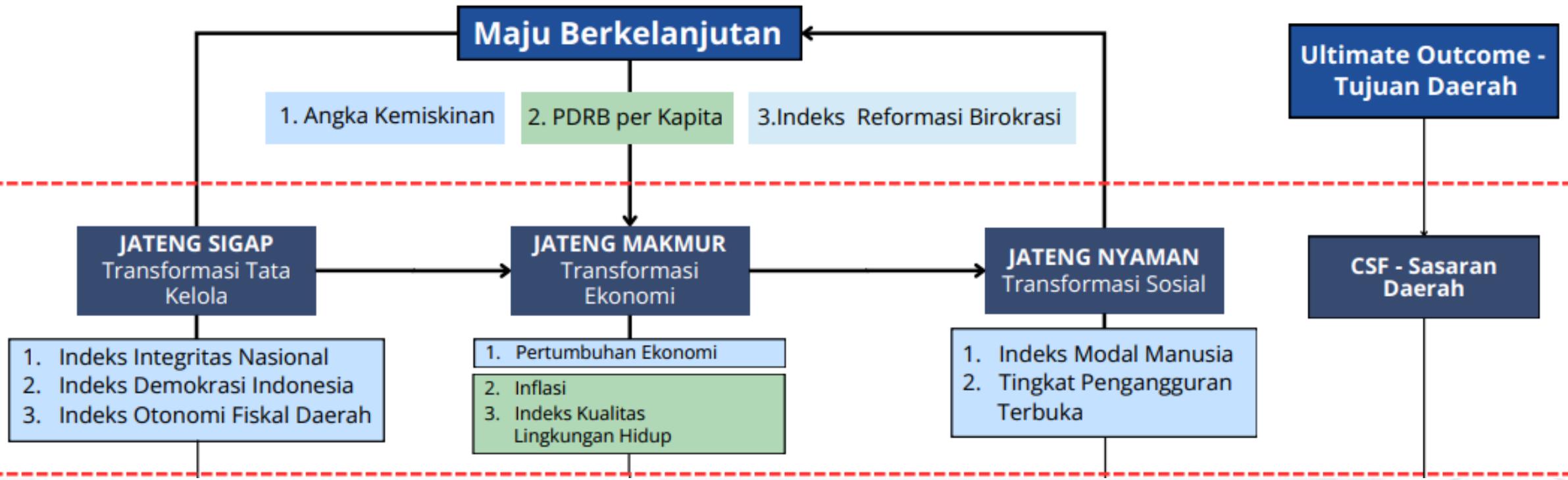
Jateng Nyaman!

Menjadi komitmen Pemerintah dalam menghadirkan **Transformasi Sosial** yang tercermin melalui terwujudnya **Stabilitas, Kondusivitas**, serta **Kenyamanan** dalam berkehidupan melalui **peningkatan kualitas layanan dasar** yang **inklusif, pengembangan budaya lokal, aman & nyaman** dalam beribadah serta perlindungan terhadap HAM untuk **Kualitas SDM Jawa Tengah** yang **Mandiri, Kompetitif** dan **Berwawasan Global**.



Logframe Pembangunan Daerah Jawa Tengah 2025-2029

**NGOPENI.
NGLAKONI.**
Jateng



**CSF : Critical Success Factor*

ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH





ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026



Dalam Ranwal RKPD Jawa Tengah Tahun 2026

Tema Pembangunan

2026

Penguatan perekonomian daerah, kualitas sumber daya manusia, ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan yang dinamis

Prioritas Pembangunan

1. Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing, dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infratraktur yang merata dan berkualitas;
2. Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif.

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

SASARAN DAERAH

SASARAN DAERAH

Indikator Kinerja:

PE, Inflasi, TPT, NTP

PRIORITAS DAERAH

Penguatan Kapasitas Perekonomian yang berdaya saing, dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas

01

Meningkatnya perekonomian Tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan

02

Meningkatnya kualitas SDM yg berdaya saing, berkarakter, & adaptif

Indikator Kinerja:

IPM, IPK, IPG, iBangga

PRIORITAS DAERAH

Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata

TUJUAN DAERAH

“Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari”

IK Tujuan Daerah:
PDRB Per Kapita,
Angka Kemiskinan,
Rasio Gini

SASARAN DAERAH

SASARAN DAERAH

Indikator Kinerja:

IKLH, Indeks Risiko Bencana

PRIORITAS DAERAH

Penguatan Ketahanan Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup

03

Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup

04

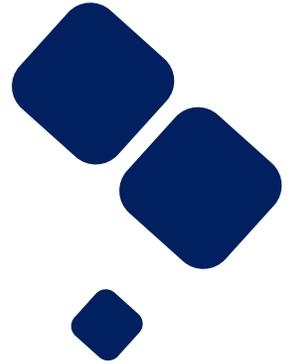
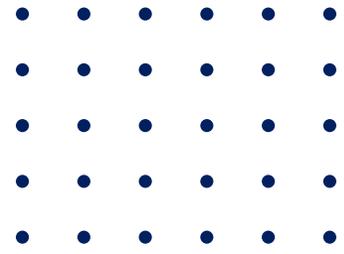
Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang dinamis

Indikator Kinerja:

Indeks Reformasi Birokrasi

PRIORITAS DAERAH

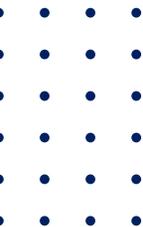
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif



ARAHAN UNTUK KOTA SALATIGA

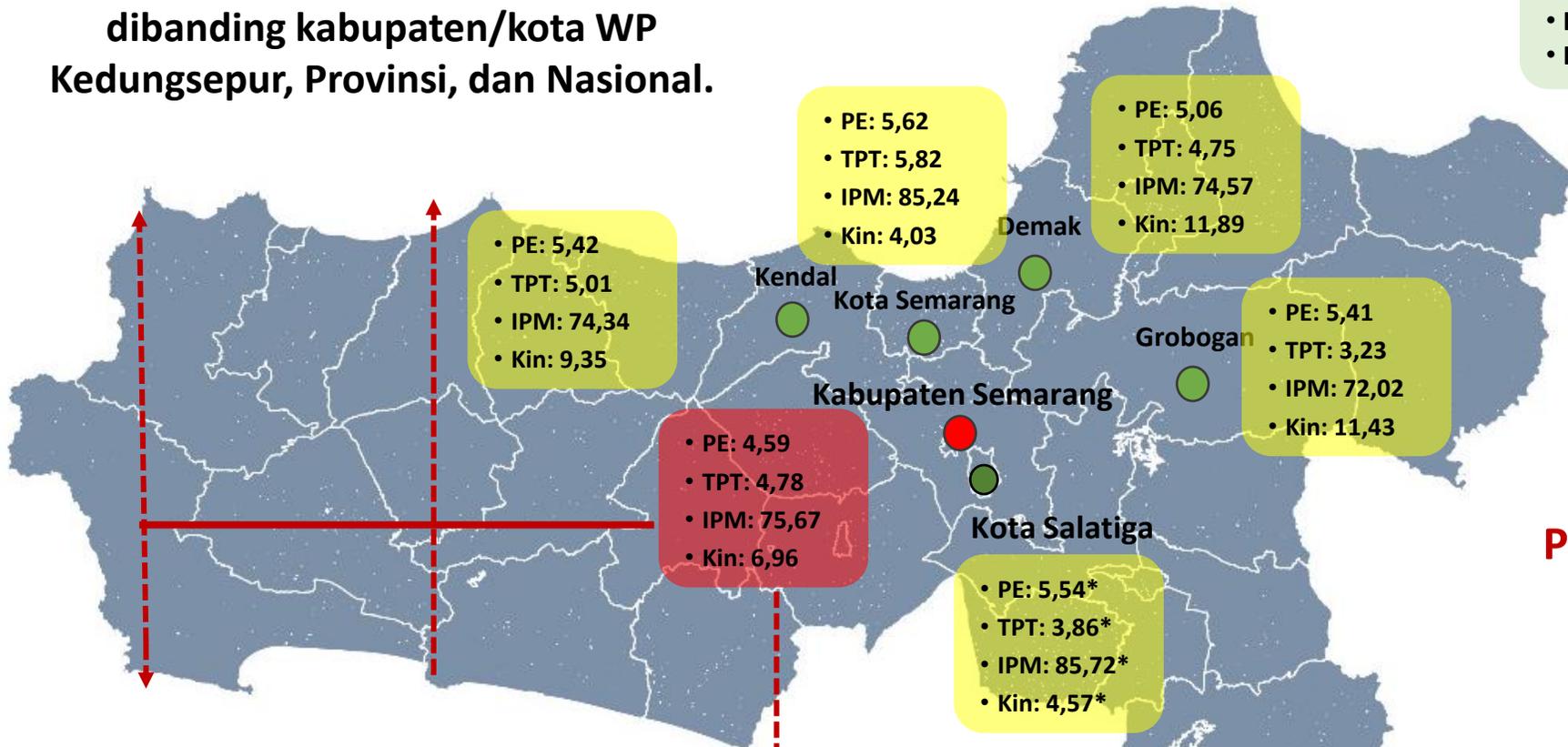


Photo by <https://unsplash.com/>



KONDISI MAKRO PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA TAHUN 2024

IPM Kota Salatiga tertinggi dibanding kabupaten/kota WP Kedungsepur, Provinsi, dan Nasional.



Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Salatiga lebih rendah daripada provinsi dan nasional, serta terendah kedua di WP Kedungsepur setelah Kab. Grobogan

JAWA TENGAH	NASIONAL
• PE : 4,95	• PE : 5,03
• TPT : 4,78	• TPT : 4,91
• IPM : 73,87	• IPM : 75,02
• Kin : 9,58	• Kin : 8,57

Tingkat Kemiskinan Kota Salatiga di bawah Provinsi & Nasional, serta terendah kedua di WP Kedungsepur

Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga merupakan tertinggi kedua di WP Kedungsepur setelah Kota Semarang

dibandingkan

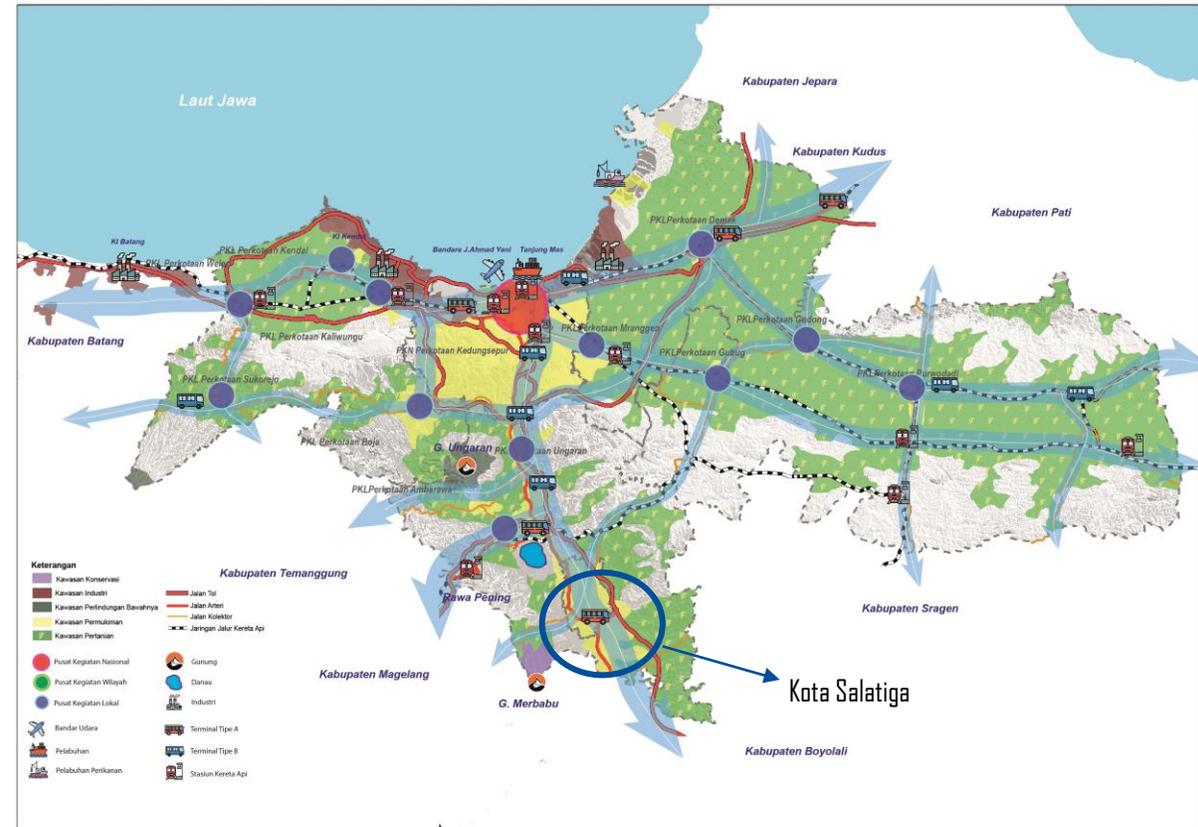




ARAHAN WP KEDUNGSEPUR

Dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

1. Mendorong peningkatan **pengembangan perkotaan** Semarang sebagai salah satu Kawasan strategis nasional dan pusat pengembangan industri berbasis keunggulan wilayah **dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup**;
2. **Pengembangan industri** diarahkan pada Kawasan Industri Semarang, Kendal, dan Demak berdasarkan **prinsip mandiri, keberlanjutan, serta kelestarian alam**;
3. Upaya **pengendalian alih fungsi lahan sawah dan pencegahan urban sprawl**;
4. Upaya **pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas, pelabuhan darat (dryport), dan pengembangan Bandara Internasional Ahmad Yani** yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah **aerocity**;
5. Peningkatan **pengelolaan dan pengembangan pariwisata** terus dilakukan dengan **integrasi di dalam dan antarkawasan**, serta mendorong kerja sama antardaerah utamanya untuk pengembangan ekonomi daerah yang saling menguntungkan dengan reformasi perencanaan dan fiskal serta penyediaan rasarana dan sarana di berbagai bidang;
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diupayakan **peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas** melalui berbasis keunggulan wilayah serta pengembangan sistem dan jangkauan layanan kesehatan perkotaan;
7. **Mewujudkan Metropolitan Semarang sebagai MICE city** didorong melalui peningkatan produktivitas, daya saing dan inovasi;
8. **Upaya-upaya menjaga kualitas lingkungan** antara lain pengendalian terhadap alih fungsi lahan yang memiliki fungsi konservasi atau area yang menghasilkan jasa lingkungan tinggi, melakukan rehabilitasi hutan/lahan kritis/terdegradasi di darat maupun pesisir, meningkatkan tata kelola persampahan maupun limbah (termasuk limbah B3), pengendalian dan pemantauan kualitas air, serta meningkatkan ketahanan terhadap risiko dan mitigasi bencana khusus terkait perubahan iklim (terutama pada kawasan pesisir).



Kota Salatiga sudah memiliki dokumen Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim sehingga dapat diintegrasikan ke dalam RKPD 2026

ARAHAN PENGEMBANGAN KOTA SALATIGA

1. Kawasan Pertanian (Pasal 43 Ayat 2 dan 3)

Kota Salatiga diarahkan untuk menjadi **Kawasan Pertanian**. Dalam rangka perwujudan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan provinsi

2. Kawasan Pertambangan dan Energi (TE) (Pasal 56 Ayat 2)

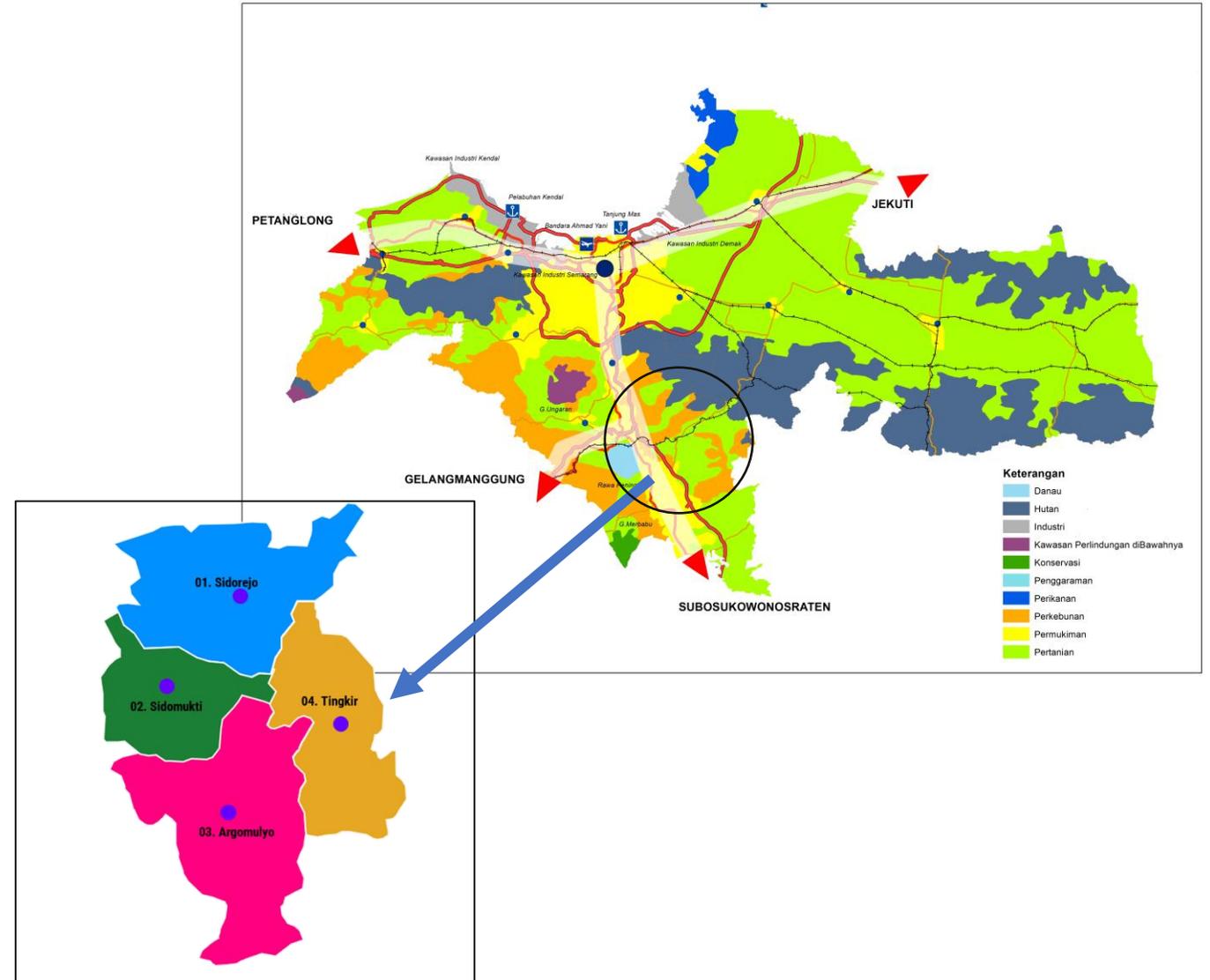
Kota Salatiga masuk ke dalam wilayah pengelolaan **pertambangan** Ungaran-Telomoyo

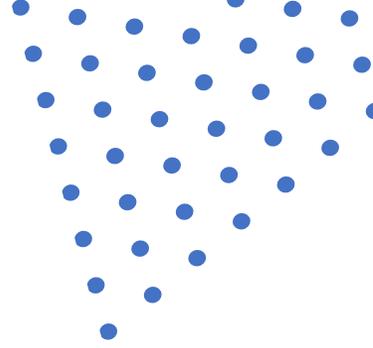
3. Kawasan Pertambangan dan Energi (TE) (Pasal 56 Ayat 3)

Kota Salatiga masuk dalam Wilayah Kerja **Panas Bumi** di daerah Candi Umbul Telomoyo di Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Temanggung dan **Kota Salatiga**

4. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) (Pasal 58)

Kota Salatiga masuk ke dalam KSP dari sudut **kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup** (KSP Rawa Pening yang berada di Kabupaten Semarang dan **Kota Salatiga**)





PRIORITAS PENGEMBANGAN PROVINSI DALAM WP KEDUNGSEPUR

Dalam Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2026

1. Layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) penghubung Kota Semarang - Kabupaten Semarang; Kota Semarang - Weleri Kabupaten Kendal; dan Kota Semarang - Kabupaten Grobogan;
2. Fasilitasi pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas;
3. Pendorongan Peningkatan status Bandara A. Yani Kota Semarang sebagai bandara internasional;
4. Optimalisasi Lembaga Pengelola Kawasan Perkotaan Kedungsepur;
5. Rehabilitasi DAS Jragung Tuntang;
6. Pengembangan Wisata khususnya Kawasan Kota Lama, Kopeng dan Rawa Pening sebagai Wisata Berbasis *Global* dan *Cultural Heritage*;
7. Pengembangan UMKM dan SDM industri Kreatif;
8. Pemberian insentif dan disinsentif pada pemilik lahan pertanian serta petani;
9. Pengendalian Fungsi Lahan melalui Program Reforma Agraria dalam bentuk sertifikasi lahan pertanian LP2B serta peningkatan akses;
10. Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan, Horti, dan Perikanan (Tebu, Tembakau, Aren, Kakao, Karet, Kopi, Jagung, Bandeng, Lele);
11. Penanganan Kawasan Terdampak Rob;
12. Pengembangan Industri Pengolahan Perkebunan dan Pertanian dan Perikanan.



BAPPEDA
Provinsi Jawa Tengah

TERIMA KASIH

